

Kajian Kebijakan Kurikulum Indonesia 1947-2013

Bayu Ananto Wibowo

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
bayuananta@upy.ac.id

Abstract

This study aims to determine the direction of policies and goals of Indonesian education from 1947 to 2013 through quality control of education, namely the curriculum. This study uses the method of literature review. The steps of this research are to collect literature sources that support the research, read and analyze the literature, then process the research material into a literature review. The results of this research are reports or information that can be sources or references used for various purposes in the world of education.

Keywords: Policy, Indonesian Curriculum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan serta tujuan pendidikan Indonesia dari tahun 1947 hingga tahun 2013 melalui pengendalian mutu Pendidikan yakni kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Langkah-langkah penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian, membaca serta menganalisis literatur, lalu mengolah bahan penelitian menjadi kajian literatur. Hasil penelitian ini adalah laporan atau informasi yang dapat menjadi sumber atau acuan yang digunakan untuk berbagai keperluan di dunia Pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kurikulum Indonesia

Copyright (c) 2021 Bayu Ananto Wibowo

Corresponding author: Bayu Ananto Wibowo

Email Address: bayuananta@upy.ac.id (Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Kab. Bantul, DIY)

Received 22 August 2021, Accepted 30 August 2021, Published 31 August 2021

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum merupakan salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan pendidikan. Setiap kurun waktu, kurikulum selalu dievaluasi, seiring dengan perkembangan dan tantangan jaman. Kemajuan teknologi yang begitu cepat, membuat pemangku kebijakan membuat perubahan-perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dan mengembangkan pendidikan Indonesia ke kualitas yang lebih baik dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Disamping itu, perubahan kurikulum juga ditujukan untuk menyesuaikan perkembangan peserta didik.

Seperti yang disampaikan oleh (Agung, 2015) bahwa, di dalam proses pengendalian mutu, kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi keluaran dari proses pendidikan. Secara periodik memang kurikulum haruslah berubah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia. Bahkan sebelum masa proklamasi, kurikulum selalu menjadi alat politik oleh pemerintahan (Ritonga, 2018). Sebagai contoh, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jepang, kurikulum pendidikan menyesuaikan dengan kepentingan politik kedua negara tersebut. Saat penjajahan oleh Jepang, kurikulum pendidikan dibentuk menyesuaikan dengan kepentingan politiknya yang memiliki ciri khas militer dan kepentingan Asia Timur Raya.

Setelah Indonesia berhasil merdeka pada 1945, kurikulum pendidikan dibentuk dengan melandasi nilai-nilai luhur bangsa sebagai ciri khas masyarakat Indonesia.

Setelah era kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami pergantian, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013 (Muhammedi, 2014). Pergantian kurikulum tersebut merupakan hasil evaluasi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan Iptek dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat tercapainya tujuan pendidikan perlu dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jaman.

Sejarah mencatat, pada masa Orde lama kurikulum telah mengalami pergantian sebanyak 3 kali. Pertama, pada tahun 1947 kurikulum pertama yang dikenal sebagai Rentjana Pelajaran. Kedua, pada tahun 1952 kurikulum ini disebut dengan Rentjana Terurai. Ketiga, di tahun 1964, Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan yang berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistic, keterampilan dan jasmani atau Pancawardhana (Hamalik, 1990).

Lalu pada masa Orde Baru, kurikulum mengalami pergantian sebanyak 4 kali. Pertama, pada tahun 1968 kurikulum ini diberi nama kurikulum 1968 dari hasil evaluasi pancawardhana disempurnakan menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kedua, pada tahun 1975 kurikulum ini diberi nama kurikulum 1975 yang terfokus pada pengembangan sistem Instruksional (PPSI). Ketiga, tahun 1984 diberi nama kurikulum 1984 terfokus pada pengembangan skill dengan model yang disebut CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau *Student Active Learning* (SAL). Keempat, ialah tahun 1994 yang dikenal dengan kurikulum 1994 (Somantrie, 2010).

Pada era Reformasi sampai tahun 2021, kurikulum telah berganti selama empat kali. Pertama, pada tahun 1999 yaitu bernama Kurikulum 1994 yang kemudian disempurnakan pada 1999; Kedua, pada tahun 2004 yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); Ketiga, pada tahun 2006 yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); dan Keempat, pada tahun 2013 muncul kurikulum baru yang dikenal dengan Kurikulum 2013 dengan fokus utamanya yaitu Pendidikan Karakter (Zulkarnain, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Langkah-langkah penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian, membaca serta menganalisis literatur, lalu mengolah bahan penelitian menjadi kajian literatur. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Marzali, 2017) Kajian literatur merupakan satu pencarian dan penelitian pustaka dengan menelusuri berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam perjalanannya, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004 dan 2006. Berikut merupakan kajian kurikulum yang diterapkan pada Pendidikan Indonesia.

Kurikulum Rencana Pelajaran (1947-1968)

Kurikulum ini diterapkan setelah proklamasi yang terpengaruh oleh tatanan sosial politik Indonesia. Tiga tahun kemudian pemerintah membentuk kurikulum “Rencana Pelajaran”. Tahun 1947. Kurikulum ini berjalan sampai tahun 1968 saat pemerintahan beralih pada masa orde baru (Rakhmat Hidayat, 2017).

Rencana pelajaran 1947

Kurikulum ini lebih dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *leer plan*, yang memiliki arti Rencana pelajaran. Penyusunan kurikulum ini bersifat politis, dari model pendidikan Belanda menuju ke kepentingan nasional. Karena suasana bangsa saat itu masih dalam semangat juang mempertahankan kemerdekaan, maka Rencana Pelajaran lebih terpusat pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang pancasilais (Wahyuni, 2015).

Pokok-pokok Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada 1950 yakni:

1. Susunan mata pelajaran dan jam belajarnya
2. Garis-garis besar pengajaran (GBP)

Rencana Pelajaran 1947 mengutamakan Pendidikan watak atau sikap, daripada kognitif, yakni:

1. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat;
2. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari
3. Perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

Fokusnya pada pengembangan Pancawardhana, yaitu:

1. Daya cipta
2. Rasa
3. Karsa
4. Karya
5. Moral

Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi, yaitu:

1. Moral
2. Kecerdasan
3. Emosional/artistik
4. Keprigelan (keterampilan)
5. Jasmaniah.

Rencana Pelajaran Terurai 1952

Di tahun 1952 kurikulum di Indonesia lebih disempurnakan. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran, kemudian diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Ciri khas kurikulum 1952 ini adalah isi pelajarannya yang harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Pada masa itu, dibentuk Kelas Masyarakat. Kelas Masyarakat adalah sekolah khusus bagi lulusan Sekolah Rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Di dalam kelas masyarakat diajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Hal ini bertujuan agar anak tak mampu melanjutkan ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja (SETIANA & NURYADI, 2020).

Kurikulum Rencana Pendidikan 1964

Intisari dari kurikulum 1964 adalah sebelum masuk ke jenjang SD pemerintah menginginkan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik dahulu. Kurikulum 1964 juga terfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian bernama Pancawardhana. Pada saat itu pendidikan dasar lebih terfokus pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, menyesuaikan dengan perkembangan anak. Sehingga pembelajaran difokuskan pada program Pancawardhana, yakni kecerdasan, emosional/artistik, pengembangan moral, keterampilan, dan jasmani (Ananda & Hudaidah, 2021).

Cara kerjanya dengan langkah yang disebut gotong royong dipimpin. Kemudian oleh pemerintah hari sabtu diterapkan sebagai hari krida. Dalam artian, Khusus di hari sabtu, siswa bebas berkegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olah raga, dan permainan, sesuai yang mereka minati. Kurikulum 1964 ini merupakan media untuk membentuk manusia pacasialis yang sosialis Indonesia, sifat-sifatnya seperti pada ketetapan MPRS No II tahun 1960.

Sifat dari Kurikulum 1964 yaitu *separate subject curriculum*, yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana). Mata Pelajaran yang ada pada Kurikulum 1964 adalah:

1. Pengembangan Moral
 - a. Pendidikan kemasyarakatan
 - b. Pendidikan agama/budi pekerti
2. Perkembangan kecerdasan
 - a. Bahasa Daerah
 - b. Bahasa Indonesia
 - c. Berhitung
 - d. Pengetahuan Alamiah
3. Pengembangan emosional atau Artistik
 - a. Pendidikan kesenian
4. Pengembangan keprigelan
 - a. Pendidikan keprigelan
5. Pengembangan jasmani

a. Pendidikan jasmani/Kesehatan

Kurikulum 1968

Perubahan yang mencolok pada Kurikulum 1968 ini ada pada struktur kurikulum pendidikannya, dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini adalah wujud dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Insani, 2019) dijelaskan bahwa tujuan dari penerapan kurikulum 1968 adalah menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia yang dan agamis. Sehingga pendidikan lebih ditujukan pada aktivitas untuk memperkuat kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Sedangkan menurut (Raharjo, 2020) kurikulum 1968 lebih menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selain itu, kurikulum ini disebut sebagai kurikulum bulat. Hal ini disebabkan karena pada kurikulum ini hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Sifat dari muatan materi pelajarannya adalah teoritis, yang tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang Pendidikan.

Hal ini berbeda dengan pendapat (Baderiah, 2018), menurutnya Kurikulum 1968 bersifat *correlated subject curriculum*, yang artinya materi pelajaran pada tingkat bawah memiliki hubungan dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada tiga kelompok besar: pembinaan pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.

Kurikulum Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994)

Kurikulum ini terfokus pada isi atau materi pelajaran yang memiliki sumber dari disiplin ilmu. Pengerjaannya lebih mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Sumber dari kurikulum ini adalah pendidikan klasik, perenalisme dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. Dimana pendidikan berfungsi untuk memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi yang baru (Asri, 2017).

Dalam studi yang dilakukan oleh (Safitri & Purwaningsih, 2016) dijelaskan bahwa belajar adalah usaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Hal ini tidak berarti terus menekankan pada materi yang disampaikan, namun berkembang secara bertahap dengan memperhatikan proses belajar peserta didik.

Kurikulum 1975

Ditetapkannya Kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia Sjarif Thajeb, adalah:

- 1) Selama Pelita I, yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional.
- 2) Adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi: "Mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan.

- 3) Adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijaksanaan pendidikan nasional.
- 4) Adanya inovasi dalam system belajar-mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif yang telah memasuki dunia pendidikan Indonesia.
- 5) Keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku.
- 6) Diperlukan peninjauan terhadap Kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun.

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip di antaranya sebagai berikut.

1. Berorientasi pada tujuan. Pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan khirarki tujuan pendidikan.
2. Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
3. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
4. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI).
5. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (Drill). Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori Behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru. (Safitri & Purwaningsih, 2016)

Kurikulum 1984

Pada Kurikulum 1984 mengangkat *process skill approach*, yaitu mengutamakan pendekatan proses, namun perihal tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga dikenal sebagai Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Disini siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Dimulai dengan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL) (Supriyanta, 2015).

Konsep CBSA yang secara teoritis baik ternyata setelah diujicoba di sekolah-sekolah, mengalami banyak penyimpangan dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Hal ini disebabkan banyaknya sekolah yang kurang mampu menerapkan CBSA. Namun yang terjadi adalah suasana gaduh di ruang kelas karena siswa berdiskusi, banyaknya tempelan-tempelan gambar, yang paling ketara adalah guru tak lagi mengajar metode ceramah. Sehingga berakibat pada penolakan CBSA bermunculan (Wardhana, 2021).

Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif.

2. Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
3. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran.
4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan.
6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar-mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya.

Kebijakan dalam penyusunan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Kurikulum 1984 memiliki enam belas mata pelajaran inti.
2. Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing.
3. Perubahan program jurusan. Kalau semula pada Kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, Bahasa, maka dalam Kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari.
 - a. A1, penekanan pada mata pelajaran Fisika
 - b. A2, penekanan pada mata pelajaran Biologi
 - c. A3, penekanan pada mata pelajaran Ekonomi
 - d. A4, penekanan pada mata pelajaran Bahasa dan Budaya.
 - e. B, penekanan keterampilan kejuruan. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup maka program ini untuk sementara ditiadakan.
4. Pentahapan waktu pelaksanaan

Kurikulum 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas I SMA berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi.

Kurikulum 1994

Sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dibuatlah Kurikulum 1994 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini memiliki dampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan berubahnya sistem semester ke sistem caturwulan. Sistem caturwulan pererapannya dalam satu tahun dibagi menjadi tiga tahap, dengan

harapan memberi kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan materi pelajaran cukup banyak. Tujuannya adalah menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah (Ritonga, 2018).

Menurut (Agung, 2015) dalam kurikulum 1994 terdapat perpaduan tujuan dan proses yang belum berhasil. Hal ini dikarenakan beban belajar siswa dinilai terlalu berat, mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal menyesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Sehingga kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut.

1. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Diharapkan agar siswa memperoleh materi yang cukup banyak.
2. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
3. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum inti untuk semua siswa di seluruh Indonesia.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial.
5. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah siswa.
6. Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.
7. Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pematapan pemahaman siswa (Safitri & Purwaningsih, 2016).

Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Ktsp (2004/ 2006)

Pada kurikulum 1975-1994, orientasinya pada pencapaian tujuan yang memiliki pengaruh terhadap penguasaan kognitif yang lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan (*skill*). Sehingga melahirkan lulusan yang tidak memiliki kemampuan yang bersifat aplikatif, oleh sebab itu diperlukan kurikulum yang fokus utamanya pada penguasaan kompetensi secara menyeluruh. Pada dasarnya untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Perubahan keempat UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.
3. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Atas dasar itulah maka Indonesia memilih untuk memberlakukan Kurikulum KBK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta penyempurnaannya dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum 2004 dikenal dengan nama KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Diterapkan atas reaksi dari tuntutan reformasi diantaranya UU No 2 1999 tentang pemerintahan daerah, UU No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, dan Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional.

Dalam kurikulum KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar, guru diberi kebebasan untuk melakukan proses belajar, yang penting adalah peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi ini mengandung beberapa aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Dengan mengembangkan aspek-aspek ini diharapkan siswa mampu memahami, menguasai, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (Muqorrobin & Nisak, 2018).

Adapun kompetensi sendiri dikelompokkan menjadi: kompetensi lulusan (dimiliki setelah lulus), kompetensi standar (dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran), kompetensi dasar (dimiliki setelah menyelesaikan satu topik/konsep), kompetensi akademik (pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan), kompetensi okupasional (kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja), kompetensi kultural (adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia), dan kompetensi temporal (memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa).

Secara umum kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai pebelajar, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Depdiknas, 2002).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia (Trisnawati et al., 2016). Secara yuridis KTSP telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP.

KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. KTSP dilaksanakan dengan merujuk pada (Undang-Undang Pendidikan No 24 Tahun 2006, n.d.) tentang Pelaksanaan SI dan SKL. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat:

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum,
2. Beban belajar,
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan, dan
4. Kalender pendidikan.

Sementara SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Penerapan KTSP, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dalam artian, penerapan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Harapannya KTSP yang disusun menyesuaikan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh (Fitri Wulandari, Susanto, 2012) menjelaskan bahwa pembentukan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada panduan yang disusun oleh BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sederhananya KTSP tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya (Idris, 2018). Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, materi dan bahan ajar serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan. Materi pendidikan dalam SKL disempurnakan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai suatu rencana tertulis (dokumen) dan kurikulum sebagai proses (implementasi). Dalam dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus mengembangkan SKL menjadi konten kurikulum yang berasal dari prestasi bangsa di masa lalu, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang (Muhtar, 2014).

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mengarahkan peserta didik menjadi:

1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah;

2. Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri;
3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pada kurikulum 2013, fokus utamanya adalah Pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini terbagi menjadi 18 nilai karakter. Dimana nilai-nilai karakter tersebut terintegrasi di dalam setiap mata pelajaran dan juga selama proses pembelajaran. Terdapat instrument penilaian khusus untuk karakter. Guru-guru diharapkan mampu mengamati peserta didik selama proses pembelajaran di dalam kelas, maupun di lingkungan sekolah. Sehingga mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya baik secara kognitif, psikomotor, namun juga baik secara moral.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2020) menjelaskan bahwa, diterapkannya kurikulum 2013 adalah sebagai respon atas permasalahan moral di Indonesia. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, moral bangsa Indonesia mengikat ke seluruh warga masyarakat.

KESIMPULAN

Sering berubahnya kebijakan pendidikan Indonesia melalui kurikulum, membuat arah tujuan Pendidikan Indonesia berubah juga. Bagi sebagian sekolah maupun siswa, perubahan kurikulum ini membuat kewalahan. Seakan terkesan baru menyesuaikan dengan kurikulum yang berjalan, sudah akan berbuah lagi. Stigma ini tentu harus dihapuskan. Karena perubahan kurikulum ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan perkembangan jaman serta teknologi yang berkembang begitu cepat. Sehingga para peserta didik tidak mengalami keterbelakangan teknologi. Selain itu, perubahan kurikulum juga menyesuaikan dengan kebutuhan Pendidikan Indonesia. Sebagai contoh Kurikulum KTSP yang berorientasi kepada nilai, ternyata dirasa kurang baik dalam mendidik peserta didik dalam hal afektifnya. Sehingga diterapkan Kurikulum 2013 yang berpusat pada Pendidikan Karakter.

REFERENSI

- Agung, L. (2015). *Sejarah Kurikulum Sekolah Menengah di Indonesia: Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Ombak.
- Ananda, A., & Hudaidah. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108. <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/article/view/1192>
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum Di Indonesia. *Modelling: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Baderiah. (2018). Buku Ajar Pengembangan Kurikulum. In *Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*.
- Depdiknas. (2002). Kurikulum Berbasis Kompetensi: Ketentuan Pokok, Pengembangan Silabus, Penilaian Berbasis Kelas, Pengelolaan dan pelaksanaan KBK. *Jakarta Pusat*, 3804248(4), 1–30.
- Fitri Wulandari, Susanto, D. (2012). Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

- dalam pembelajaran matematika di SMPLB TPA Jember. ©*Kadikma*, 3(3), 71–81.
- Hamalik, O. (1990). *Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengembangannya*. Mandar Maju.
- Idris, A. R. (2018). Penerapan kurikulum 2013 di SMA dan MA: Tinjauan manajemen kurikulum. *Azkiya*, 1(2), 1–23.
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1613>
- Undang-undang Pendidikan No 24 Tahun 2006, Pub. L. No. 24, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan.
- Muhammedi. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Muhtar, T. (2014). Analisis Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Aspek Nilai Karakter Bangsa. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(2), 168–175. <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v1i2.879>
- Muqorrobin, M., & Nisak, M. (2018). Kurikulum 2004 / KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). *INTAJUNA: Jurnal Hasil Penelitian Studi Kepustakaan, Penilaian, Penerapan Teori Dan Kajian Analisis Di Bidang Pendidikan Bahasa Arab*, 2(1), 1–18.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Rakhmat Hidayat. (2017). *DINAMIKA PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA Rentjana Pembelajaran 1947 Hingga Kurikulum 2013*. LABSOS. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Ritonga, M. (2018). Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period. *Bina Gogik*, 5(2), 1–15.
- Safitri, R., & Purwaningsih, S. (2016). Kurikulum Nasional Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Baru Tahun 1968- 1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644.
- SETIANA, D. S., & NURYADI. (2020). *KAJIAN KURIKULUM SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH*. GRAMASURYA.
- Somantrie, H. (2010). Kompetensiâ Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(6), 684–698. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i6.497>
- Supriyanta, E. (2015). PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CBSA DALAM USAHA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIDANG STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BHINA

- KARYA RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 52–64.
- Trisnawati, Gunawan, D., & Nongkeng, D. H. (2016). Perbandingan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Kurikulum 2013 Di SMAN 1 Sinjai Utara. *Jurnal Mirai Management*, 1(September), 1–9.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/1/1>
- Wahyuni, F. (2015). KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya*, 10(2), 231–242.
<https://doi.org/10.1023/A:1013199923212>
- Wardhana, I. P. (2021). Review Kurikulum Pendidikan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Tahun 1984 dalam Pendidikan Indonesia. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 3(1), 17.
<https://doi.org/10.32585/keraton.v3i1.1611>
- Wibowo, B. A. (2020). Pancasila sebagai Landasan Filosofi Pendidikan Karakter Kurikulum 2013. *Biormatika :Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 10–19.
<http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FKIP/article/view/678/574>
- Zulkarnain. (2018). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Sejarah Massa Reformasi di SMA. *Istoria*, 14(2), 1–13.